

Siaran Pers  
Sidang Sub-Committee Asian Parliamentary Assembly (APA)  
*Combating Corruption in Asia dan Challenges and Opportunities of  
Globalization in Asia*

Pada tanggal 18-19 Juni 2009, DPR RI telah melaksanakan Sidang Sub-Committee *Asian Parliamentary Assembly* (APA) dalam *Combating Corruption in Asia dan Challenges and Opportunities of Globalization in Asia*. Sidang tersebut dihadiri oleh para anggota APA dari Iran, Yordania, Kuwait, Palestina, Filipina, Bahrain, Syria, Saudi Arabia dan Indonesia. Sidang dipimpin oleh Ketua badan Kerjasama Antar parlemen (BKSAP), Abdillah Toha. Di dalam pembahasan, anggota APA sepakat bahwa korupsi dan globalisasi merupakan persoalan besar yang banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai bangsa di Asia. Korupsi telah menurunkan tingkat kualitas kehidupan, ekonomi, demokrasi dan aturan hukum.

Dalam pembahasan mengenai korupsi di hari pertama sidang hadir wakil ketua KPK, Bibit Samad Rianto, yang menyampaikan pemaparan mengenai proses pembentukan KPK yang merupakan inisiatif DPR RI dan keberhasilan serta kendala yang dihadapinya. Berkaca dari pengalaman Indonesia, DPR RI mengusulkan negara-negara anggota APA untuk membentuk suatu badan independen yang menangani pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti KPK di Indonesia. Selain usulan dari Indonesia, delegasi Parlemen Palestina juga mengusulkan perlunya UU untuk memonitor humanitarian aid yang disalurkan melalui LSM di tingkat internasional terutama di daerah bencana.

Pada pertemuan Sub-Committee on Challenges and Opportunities of Globalization in Asia di hari kedua, anggota APA mengakui bahwa globalisasi yang terjadi merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat dihindari, namun APA memandang perlu untuk mengelola globalisasi ini sehingga dampak-

dampak negatif yang muncul seiring membesarnya arus globalisasi dapat dicegah dan diolah sedemikian rupa sehingga tidak mengikis banyak hal positif yang sudah ada di masing-masing negara anggota APA. Globalisasi telah banyak merugikan negara berkembang terutama disebabkan oleh sistem perdagangan dan keuangan global yang tidak menguntungkan negara-negara berkembang. Sebagai kawasan yang memiliki potensi-potensi strategis terutama didukung oleh sumber daya ekonomi dan jumlah penduduk yang besar, Asia seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah perekonomian dunia.

Dalam kaitan ini, Delegasi DPR RI di dalam resolusi nya mengusulkan untuk mendorong negara anggota APA untuk memulai dialog kemungkinan mengganti mata uang dolar sebagai cadangan devisa. Hal ini didasari fakta bahwa Asia memiliki cadangan devisa terbesar di dunia. Sidang juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI, Mari Pangestu, yang menyampaikan bahwa negara-negara Asia perlu bersatu dalam memperjuangkan kepentingannya di WTO terkait dengan perjuangan untuk melanjutkan *Doha Development Round*. Beliau juga menggarisbawahi perlunya perwakilan negara-negara Asia untuk duduk di jabatan strategis di lembaga keuangan internasional.